

KABUPATEN JEMBRANA
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Organisasi : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH / PPKD

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	03	00	00	4			PENDAPATAN DAERAH	638.997.050.566,58	677.470.970.983,86	38.473.920.417,28	6,02	- PMK Nomor 218/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 TA. 2013. - PMK Nomor 157/PMK.07/2012 tentang Alokasi Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 TA. 2008, TA. 2009 dan TA. 2010. PMK Nomor 207/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanan TA. 2013 - PMK Nomor 102/PMK.07/2013 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara DBH PBB TA. 2013. - Peraturan Gubernur Bali Nomor 34
1.20	03	00	00	4	2		Dana Perimbangan	511.597.003.353,20	518.352.066.072,03	6.755.062.718,83	1,32	
1.20	03	00	00	4	2	1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	15.274.007.353,20	22.029.070.072,03	6.755.062.718,83	44,22	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	03	00	00	4	2	2	Dana alokasi umum	450.919.726.000,00	450.919.726.000,00			Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2013
1.20	03	00	00	4	2	3	Dana alokasi khusus	45.403.270.000,00	45.403.270.000,00			Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor, S-831/PK/2012, tanggal 24 Oktober 2012, perihal Pemberitahuan Alokasi DAU dan DAK TA. 2013
1.20	03	00	00	4	3	3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	127.400.047.213,38	159.118.904.911,83	31.718.857.698,45	24,89	Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor, S-831/PK/2012, tanggal 24 Oktober 2012, perihal Pemberitahuan Alokasi DAU dan DAK TA. 2013
1.20	03	00	00	4	3	3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	72.868.021.213,38	85.477.295.911,83	12.609.274.698,45	17,30	- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Nomor 973/154/Keu, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Nomor 973/1553/ Keu, tanggal 25 April 2013, perihal Kewajiban Bagi Hasil Pajak. - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 16 Nopember 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Nomor 973/1553/ Keu, tanggal 25 April 2013, perihal Kewajiban Bagi Hasil Pajak. - Surat Sekretaris Daerah Provinsi

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1								2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20		03	00	00	4	3	4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	51.680.144.000,00	70.517.727.000,00	18.837.583.000,00	36,45	Bali, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan PHR serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Nomor 973/1553/ Keu, tanggal 25 April 2013, perihal Kewajiban Bagi Hasil Pajak. - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan PHR serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan PHR serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Nomor 973/1553/ Keu, tanggal 25 April 2013, perihal Kewajiban Bagi Hasil Pajak. - PMK Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah, Prov., Kabupaten dan Kota TA. 2013. - PMK 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah, Prov., Kabupaten dan Kota TA. 2013.

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.20	03	00	00	4	3	5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.851.882.000,00	3.123.882.000,00	272.000.000,00	9,53	- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 16 Nopember 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 16 Nopember 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 16 Nopember 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan PHR serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan PHR serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan PHR

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
												serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 5 Oktober 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak dan PHR serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013 - Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 18 Januari 2013, perihal Pagu Definitif Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013
							JUMLAH PENDAPATAN	638.997.050.566,58	677.470.970.983,86	38.473.920.417,28	6,02	
1.20	03	00	00	5			BELANJA DAERAH	61.547.433.735,93	69.606.598.434,11	8.059.164.698,18	13,09	
							Belanja Tidak Langsung	61.547.433.735,93	69.606.598.434,11	8.059.164.698,18	13,09	
1.20	03	00	00	5	1	4	Belanja hibah	12.410.654.174,17	16.120.654.174,17	3.710.000.000,00	29,89	
1.20	03	00	00	5	1	5	Belanja bantuan sosial	3.410.000.000,00	3.410.000.000,00			
1.20	03	00	00	5	1	6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	7.843.126.799,34	8.528.288.039,07	685.161.239,73	8,73	
1.20	03	00	00	5	1	7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan partai politik	37.383.652.762,42	41.247.656.220,87	3.864.003.458,45	10,33	
1.20	03	00	00	5	1	8	Belanja tidak terduga	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)	
							Belanja Langsung					
							JUMLAH BELANJA	61.547.433.735,93	69.606.598.434,11	8.059.164.698,18	13,09	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)		DASAR HUKUM
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1							2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
							SURPLUS/ (DEFISIT)	577.449.616.830,65	607.864.372.549,75	30.414.755.719,10	5,26	
1.20	03	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	35.679.791.456,00	66.326.883.156,99	30.647.091.700,99	85,89	
1.20	03	00	00	6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.482.791.456,00	61.063.989.381,99	31.581.197.925,99	107,11	
1.20	03	00	00	6	1	7	Penerimaan Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00			
1.20	03	00	00	6	1	8	Dana Bergulir	997.000.000,00	62.893.775,00	(934.106.225,00)	(93,69)	
							JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.679.791.456,00	66.326.883.156,99	30.647.091.700,99	85,89	
1.20	03	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.397.000.000,00	9.468.439.106,02	71.439.106,02	0,76	
1.20	03	00	00	6	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00			
1.20	03	00	00	6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir	997.000.000,00	1.068.439.106,02	71.439.106,02	7,16	
1.20	03	00	00	6	2	5	Pengeluaran Dana Talangan	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00			
							JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.397.000.000,00	9.468.439.106,02	71.439.106,02	0,76	
							PEMBIAYAAN NETTO	26.282.791.456,00	56.858.444.050,97	30.575.652.594,97	116,33	